

JALAN PANJANG PEMULIHAN EKONOMI INDONESIA

**Anis Byarwati
Anggota Komisi XI DPR RI
Fraksi PKS**

PEMBAHASAN

Kondisi Ekonomi Indonesia 2020

Beban di Sektor Informal

Peningkatan Jumlah Penduduk Miskin

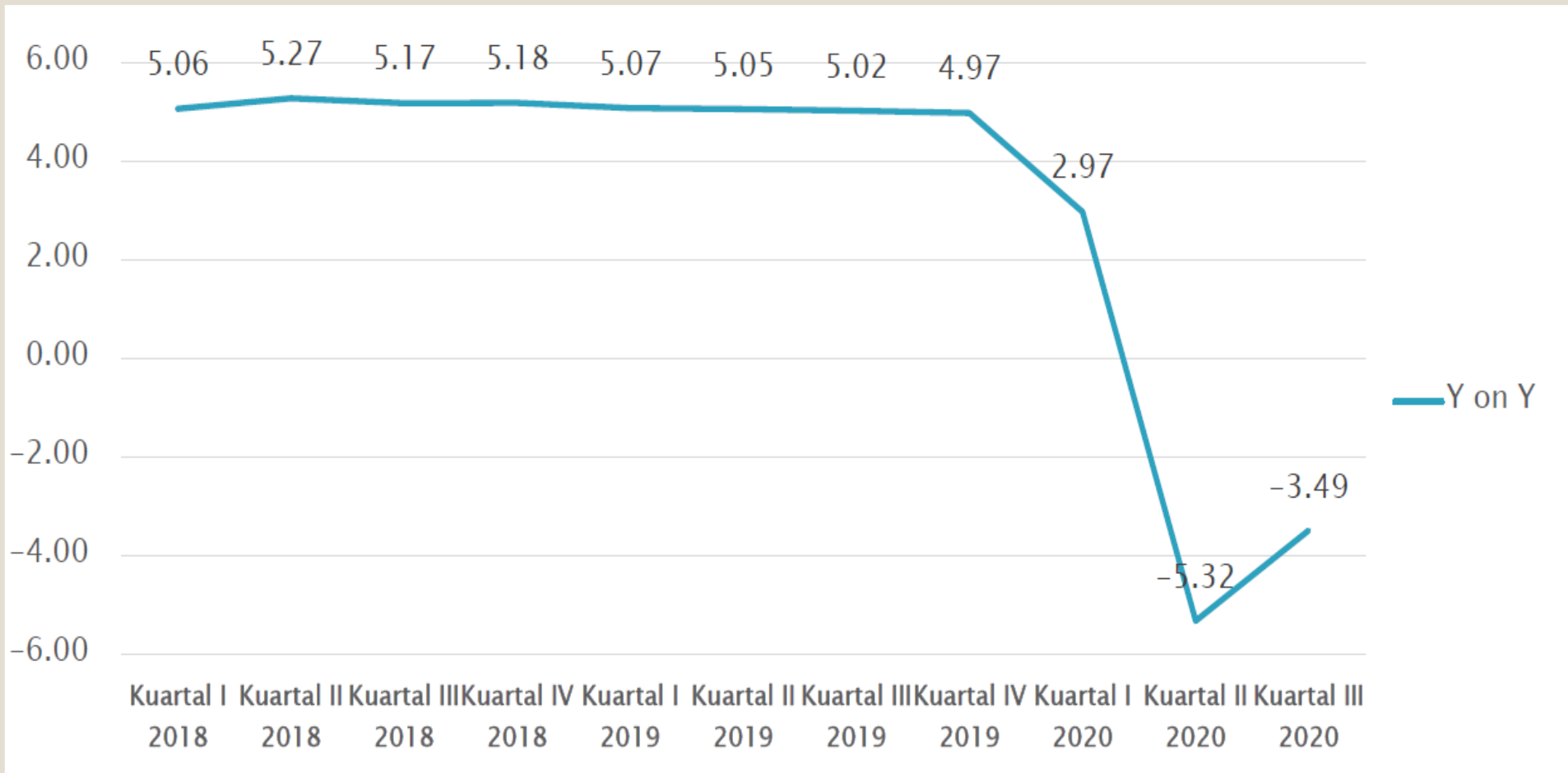
Realisasi APBN dan PEN yang lamban

Akuntabilitas program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Ekonomi Indonesia 2020: Pertumbuhan Menurun dan Resesi Ekonomi

- Perekonomian Indonesia telah masuk ke jurang resesi, dan untuk pertama kalinya dalam 22 tahun terakhir, mengulang kondisi krisis ekonomi pada 1998.
- Trend pelemahan ekonomi Indonesia sesungguhnya terus terjadi dalam tiga tahun terakhir dengan melihat kecenderungan data kuartalan.
- Perekonomian juga stagnan tumbuh hanya dikisaran 5 persen dengan kecenderungan menurun ditengah tekanan ekonomi global.
- Tahun 2020 ekonomi tersungkur, baik dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran akibat pandemi Covid-19.

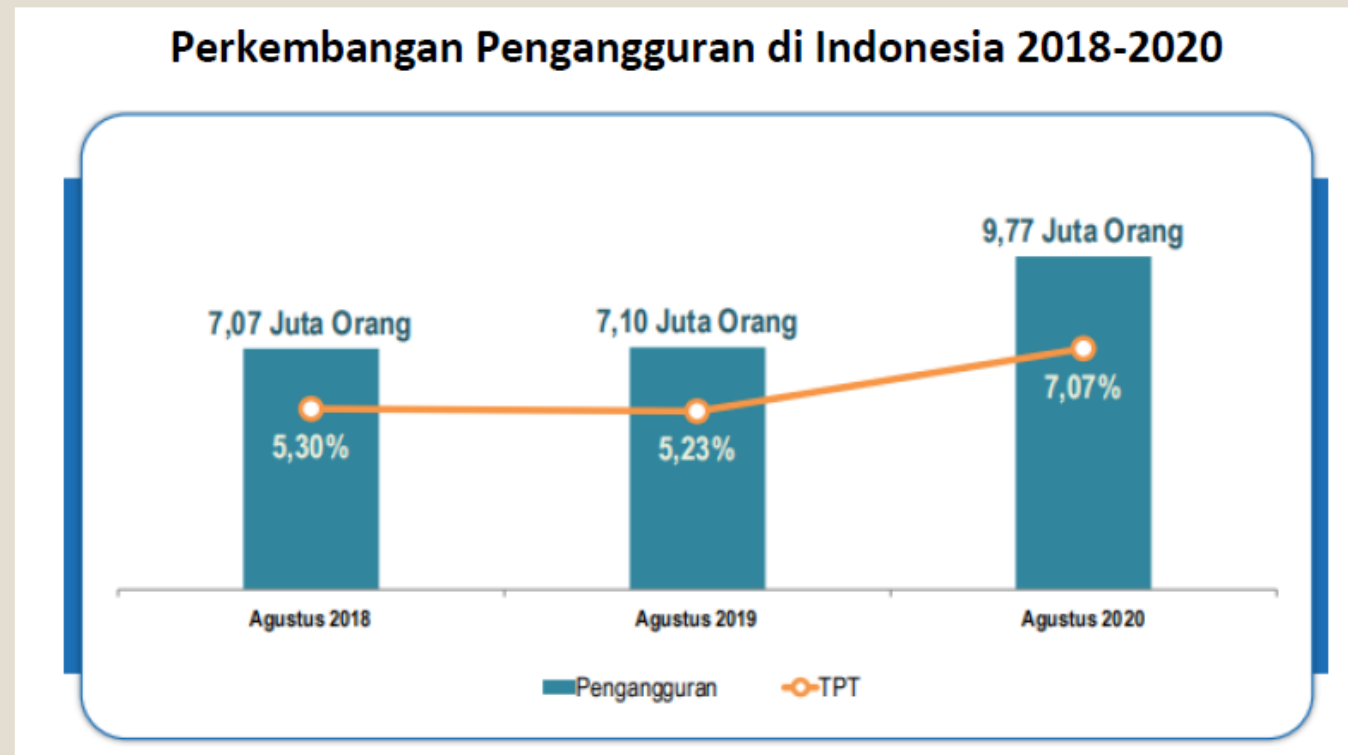
Ekonomi Indonesia 2020: Pertumbuhan Menurun dan Resesi Ekonomi



Ekonomi Indonesia 2020: Peningkatan Jumlah Pengangguran...

- Kondisi resesi kemudian berdampak serius pada lonjakan angka pengangguran, kemiskinan hingga ketimpangan.
- Tingkat pengangguran terbuka mengalami lonjakan yang sangat tinggi dan kondisi ketenagakerjaan saat ini mundur kembali satu dekade atau kembali ke kondisi tahun 2011 (Tasmilah, 2020).
- Tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2020 melonjak menjadi 7,07 persen dari posisi 5,23 persen pada Agustus 2019.
- Jumlah pengangguran melonjak menjadi 9,77 juta pada Agustus 2020, naik dari 7,1 juta pada Agustus 2019.

Ekonomi Indonesia 2020: Peningkatan Jumlah Pengangguran



Beban di Sektor Informal...(1)

- **Pandemi Covid-19 telah menyebabkan gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK yang cukup besar.**
- Secara statistik, tambahan pengangguran terbuka seolah-olah masih relatif kecil dan tidak mengkhawatirkan.
- **Masalahnya, korban PHK tersebut tidak langsung menjadi pengangguran terbuka baru, tetapi sebagian beralih ke sektor informal (Hartati, 2020).**

Beban di Sektor Informal...(1)

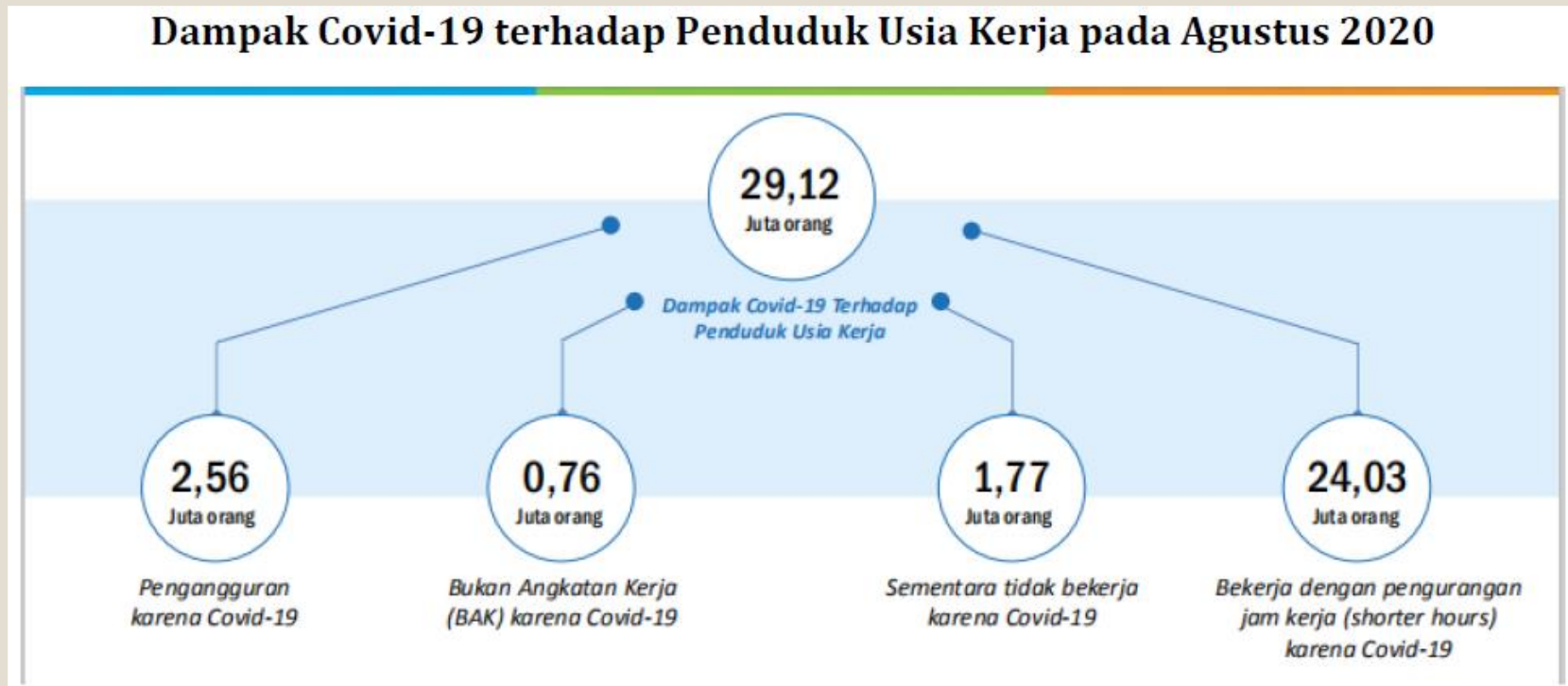


Beban di Sektor Informal... (2)

- **Porsi pekerja informal naik cukup drastis, dari 55,88 persen pada Agustus 2019 menjadi 60,47 persen atau mencapai 77,68 juta orang.** Artinya, pekerja formal yang cukup memiliki jaminan kerja, seperti buruh, pegawai, dan karyawan, hanya tinggal **39,53 persen atau 50,77 juta orang.**
- Dengan demikian, walaupun jumlah pengangguran terbuka hanya 9,77 juta orang, **sebenarnya pekerja yang bekerja paruh waktu atau setengah menganggur sangat besar.**
- Jumlah pekerja penuh, yang bekerja minimal 35 jam per minggu, tinggal 82,02 juta orang atau turun 9,46 juta orang. Secara persentase, jumlah pekerja penuh turun dari 71,04 persen menjadi 63,85 persen (Hartati, 2020).

◦ .

Secara keseluruhan terdapat 29,12 juta orang (14,28 persen) penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19, jumlah yang sangat besar dan membutuhkan kebijakan serius dari pemerintah



Peningkatan Jumlah Penduduk Miskin ..

- **Selain pengangguran, jumlah rakyat miskin mengalami peningkatan dan akan semakin memburuk dengan tekanan dampak pandemi Covid-19.**
- Pada Maret 2020 rakyat miskin meningkat sebesar 1,63 juta jiwa dari September 2019, totalnya menjadi 26,42 juta atau 9,78 persen dari penduduk Indonesia.
- Pada September 2019, jumlah penduduk miskin mencapai 24,79 juta atau sekitar 9,22 persen dari total penduduk, angka ini juga menunjukkan peningkatan sebesar 1,28 juta jiwa terhadap Maret 2019.

Peningkatan Jumlah Penduduk Miskin

- Meskipun digambarkan bahwa pandemi Covid-19 akan menjadi penyebab utama terjadinya lojakan tingkat kemiskinan 2020, namun demikian **dengan melihat data yang disajikan merupakan rentang waktu sebelum terjadinya pandemi Covid-19, hal ini memberikan kesimpulan lain bahwa Pemerintah belum berhasil menangani kemiskinan di Indonesia.**
- Pandemi Covid-19 memperparah keadaan dengan banyaknya penduduk yang kehilangan mata pencaharian.

Peningkatan Jumlah Penduduk Miskin

- Garis kemiskinan pada Maret 2020 tercatat sebesar Rp454.652,-/kapita/bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp335.793,- (73,86 persen) dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp118.859,- (26,14 persen).
- **Menggunakan batas garis kemiskinan sebesar Rp. 454.652/kapita/bulan (pengeluaran) adalah nilai yang sangat kecil dan bahkan didominasi untuk kebutuhan makanan saja.**

Peningkatan Kelompok Rentan Miskin...

- Menurut Bank Dunia (2019) kelompok yang dianggap telah diatas batas garis kemiskinan tetapi belum memiliki keamanan ekonomi (*aspiring middle class*) masih mencapai sekitar 115 juta (45%), yakni mereka yang mempunyai pengeluaran antara Rp 532.000 s/d Rp 1,2 juta (per orang/bulan).
- Dibawah *aspiring middle class* masih ada sekitar 62 juta (25%) orang yang dianggap masuk kategori *vulnerable*, yakni mereka yang mempunyai pengeluaran antara Rp. 354.000 s/d Rp. 532.000 (per orang/bulan).



Peningkatan Kelompok Rentan Miskin

- Jadi secara keseluruhan berdasarkan studi Bank Dunia diatas masih ada sekitar 177 juta (70%) orang di Indonesia yang walaupun sudah berada diatas garis kemiskinan tetapi belum benar-benar memiliki keamanan ekonomi, dan setiap saat bisa kembali berada dibawah garis kemiskinan.
- Kelompok *middle class* (pengeluaran antara Rp. 1,2 juta s/d Rp. 6 juta per orang/bulan) menurut studi yang sama diatas dewasa ini masih sekitar 20% penduduk (52 juta).

Peningkatan Kesenjangan...

- Kondisi ekonomi 2020, juga ditandai dengan meningkatnya kesenjangan dimana trend sebelumnya sedikit menurun.
- Kondisi mutakhir, gini ratio mengalami kenaikan menjadi 0,381 pada Maret 2020 dari 0,38 pada Agustus 2019 (BPS, 2020).
- Meningkatnya gini ratio menggambarkan tidak optimalnya kinerja pemerintah dalam upaya menekan kesenjangan.
- Seorang peneliti senior terkait ekonomi Indonesia dari *University of London*, Anne Booth (2020) menilai bahwa persoalan ketimpangan pendapatan dan kekayaan di Indonesia adalah masalah yang serius, bahkan persoalan ketimpangan mutakhir juga dianggap lebih buruk dibandingkan di era Orde Baru.

Realisasi APBN dan PEN yang lamban...

- Kinerja Pemerintah dalam pelaksanaan APBN 2020 secara umum terlihat lamban dan lemah, sehingga belanja negara tidak berdampak optimal dalam meredam resesi ekonomi.
- Realisasi pendapatan negara hingga Oktober 2020 mencapai Rp1.276 triliun atau 75 persen dari target.
- Sementara itu **realisasi belanja negara baru mencapai 74 persen atau sebesar Rp2.041 triliun.**

Realisasi APBN dan PEN yang lamban...

- **Lambatnya eksekusi dan realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berdampak tidak optimal pada upaya meredam resesi dan dampak buruk peningkatan pengangguran dan kemiskinan.**
- **Secara umum realisasi anggaran PEN tersebut tersendat karena ketidaksiapan birokrasi.**
- **Sampai akhir November 2020, realisasi PEN hanya 58 persen. Selain persoalan minimnya realisasi, hal lain yang menyulut emosi publik adalah kasus korupsi bantuan sosial.**

Realisasi APBN dan PEN yang lamban...

Realisasi APBN (Jan-Okt 2020)

	APBN (Perpres 72/2020)	Realisasi Jan-Okt	%	Growth (yoy)
Pendapatan Negara	1.699	1.276	75.11	-15.35
Penerimaan Perpajakan	1.404	990.95	70.56	-15.58
PNBP	294	278.82	94.79	-16.34
Belanja Negara	2.739	2.041	74.54	13.58
Belanja Pemerintah Pusat	1.975	1.343	68.03	19.9
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	763.9	697.9	91.36	3.12

Sumber: Kementerian Keuangan, 2020

Program PEN dan Realisasinya (November 2020)

	Stimulus (Rp Triliun)	Realisasi (Rp Triliun)	%
Kesehatan	97.26	37.31	38.36
Perlindungan sosial	234.33	193.07	82.39
K/L Pemda	65.97	35.33	53.55
UMKM	114.81	96.61	84.15
Insentif dunia usaha	120.6	44.29	36.72
Pembiayaan korporasi	62.2	2	3.22
Total	695.2	408,6	58,78

Sumber: Kementerian Keuangan, 2020

Progres Realisasi Anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) per 23 Desember 2020.

- Progres realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional terdampak pandemi mencapai Rp502,71 triliun atau 72,3 persen dari total anggaran Rp695,2 triliun per 23 Desember 2020.
- klaster perlindungan sosial mencapai 94,7 persen atau sebesar Rp217,99 triliun dari alokasi anggaran sebesar Rp230,21 triliun,
- klaster UMKM mencapai realisasi sebesar 92,8 persen atau Rp107,93 triliun dari alokasi anggaran sebesar Rp116,31 triliun.
- Klaster Kesehatan realisasinya mencapai 54,4 persen atau Rp54,13 triliun dari alokasi anggaran sebesar Rp99,5 triliun,
- klaster Intensif Usaha mencapai realisasi sebesar 45,4 persen atau Rp54,73 triliun dari alokasi anggaran sebesar Rp120,61 triliun.
- klaster Pembiayaan Korporasi mencapai realisasi sebesar 13,4 persen atau sebesar Rp8,16 triliun dari alokasi anggaran sebesar Rp60,73 triliun.

Akuntabilitas program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

- Penanganan pandemi Covid-19 dan PEN tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri, terutama menyangkut persoalan akuntabilitas dan pertanggungjawaban Keuangan.
- Penting membangun koordinasi, sinergi dan kolaborasi antara fungsi pengawasan DPR RI dan fungsi pemeriksaan BPK.
- Peran BPK melakukan pemeriksaan secara berkala, sebagai langkah pengawalan baik kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam penyelenggaraan program penanganan dampak kesehatan, program-program bantuan sosial, maupun program pemulihan ekonomi.
-

ALHAMDULILLAH
ALLAHU A'LAM BISH SHAWWAB